

# Membangun Ikatan Kebangsaan dalam Kebhinekaan<sup>1</sup>

Otto Gusti Madung

(Dosen STFK LEDALERO)

7 Desember 2020

Webiner oleh Forum Kebangsaan

## Pendahuluan

Kita harus akui bahwa gerakan intoleran sedang mengotori ruang publik kita. Ada sebuah kejadian menarik di tempat saya, di Maumere, Flores, NTT beberapa hari lalu. Pada suatu siang hari yang panas di salah satu sudut kota Maumere, seorang gadis jatuh tersungkur di tengah jalan. Warga yang menyaksikan itu secara spontan berlari ke arah korban. Akan tetapi tak seorang pun berani membantu, sebab korban mengenakan jilbab. Warga takut membantu, sebab dalam pikiran mereka bisa jadi korban adalah seorang teroris yang menyamar jadi perempuan berjilbab. Ada juga yang berpikir, bisa jadi ada bom yang disembunyikan dalam pakaian korban itu. Singkatnya, tak ada yang berani membantu korban yang terkapar di hadapan mereka.

Lalu apa yang mereka buat? Warga menelepon polisi untuk memastikan bahwa korban bukan seorang teroris. Setelah polisi memeriksa ternyata si korban tadi adalah mahasiswi di sebuah universitas di Maumere. Si korban dari pagi hingga siang hari berdiri di jalan bersama teman-temannya untuk mengumpulkan sumbangan guna membantu para korban erupsi gunung berapi di Lembata. Si korban jatuh tersungkur karena dari pagi hingga

---

<sup>1</sup> Dipresentasikan pada tanggal 7 Desember 2020 dalam webinar yang diselenggarakan oleh Forum Kebangsaan dengan tema “Membangun Ikatan Kebangsaan Yang Kokoh dalam Bingkai Kebhinekaan”.

siang bekerja mengumpulkan sedekah untuk korban di Lembata tanpa makan pagi.

Contoh ini menunjukkan secara kasat mata bagaimana simbol keagamaan sudah menjadi ancaman bagi yang lain. Ketika kekerasan atas nama agama merebak di tempat lain, maka simbol keagamaan yang sebelumnya merupakan identitas yang mengundang pengakuan kolektif, kini menjadi ancaman yang harus disingkirkan. Fenomena ini tentunya membahayakan ikatan kebangsaan yang telah dibangun di atas pilar kebhinekaan selama ini. Apa yang harus dilakukan untuk mengatasi persoalan ini? Saya ingin membahasnya dalam beberapa langkah:

## **1. Populisme dan Krisis Demokrasi**

Menguatnya politik identitas pada tataran global ditandai dengan munculnya fenomena populisme kanan yang mengancam sejumlah negara demokratis yang sudah mapan. Hal ini mencapai puncaknya ketika Donald Trump terpilih pada tahun 2016 dan fenomena Brexit. Kendatipun sekarang Joe Biden memenangkan pemilihan presiden di Amerika Serikat, namun 78 juta dari pemilih AS telah menjatuhkan pilihan pada Donald Trump yang secara sistematis mengangkat isu rasial dalam kampanye. Artinya, populisme kanan tetap menjadi ancaman bagi demokrasi ke depan.

Menguatnya politik identitas ini adalah akibat dari kebijakan demokrasi liberal yang telah meminggirkan kelas menengah dan buruh dalam empat dekade terakhir. Para pemimpin populis berhasil mengkapitalisasi kemarahan dan kebencian kelompok ini dan menjadikannya agenda politik elektoral. Perkembangan serupa terjadi juga di Indonesia. Ketika partai-partai politik lebih sibuk melayani kepentingan oligarki, kelompok-kelompok miskin dan terpinggirkan akan mencari saluran sendiri untuk mengungkapkan aspirasi politiknya. Tidak jarang organisasi yang

intoleran sangat militant mencari konstituen dan mampu menampung aspirasi dari kelas-kelas pinggiran tersebut.

Apa yang harus dilakukan? Diskursus tentang intoleransi dan pembatasan hak-hak minoritas tidak boleh hanya terbatas pada isu hak sipil politik atau hak-hak liberal, tapi juga harus menyentuh persoalan keadilan sosial atau hak-hak sosial masyarakat yang terpinggirkan. Untuk konteks Indonesia ancaman terhadap kebhinekaan harus juga menyentuh persoalan kesenjangan sosial akibat dari perkembangan demokrasi yang terkooptasi kepentingan oligarki.

## **2. Nasionalisme**

Pada awal berdirinya republik ini, nasionalisme adalah sebuah idealisme yang mampu mempersatukan seluruh elemen bangsa Indonesia dalam perjuangan mengusir kekuasaan kolonial. Nasionalisme atau semangat kebangsaan terbukti telah mengatasi sekat-sekat etnis dan agama dalam mewujudkan Indonesia yang satu dan merdeka.

Apa itu *nation* atau bangsa yang menjadi akar kata nasionalisme? Ben Anderson mendefinisikan bangsa sebagai *an imagined political community*, sebuah komunitas politis bayangan. Bayangan pada tempat pertama mengungkapkan gambaran mental yang mengikat anggotanya. Lebih dari itu, bayangan juga merupakan gambaran mental yang mampu mengkonstruksikan sebuah realitas politik.

Dalam sejarah bangsa Indonesia Sumpah Pemuda misalnya merupakan sebuah perwujudan dari gambaran mental tersebut. Dalam peristiwa Sumpah Pemuda nasionalisme telah menciptakan kenyataan politis yang mempersatukan Indonesia sebagai sebuah bangsa. Dan pada tahun 1945 komunitas bayangan ini menjadi riil dalam wujud Republik Indonesia yang merdeka. Indonesia yang terdiri dari kebhinekaan suku, agama, ras dan budaya kini tampil seolah-olah sebagai sebuah subjek politis tunggal.

Bangsa Indonesia didirikan bukan sebagai sebuah *ethnic nation*, melainkan *civic nation*. Itu berarti, bangsa ini tidak dibangun atas dasar ikatan emosional kesamaan darah, agama atau keyakinan. Konsep bangsa Indonesia sejalan dengan ide tentang komunitas bayangan Ben Anderson. Atau dalam bahasa Ernst Renan, bangsa merupakan suatu asas spiritual dan puncak dari sebuah masa silam yang panjang dari perjuangan-perjuangan, pengorbanan dan devosi.<sup>2</sup> Yang mempertemukan Indonesia sebagai bangsa bukan sebuah persamaan organis alamiah seperti darah atau agama, melainkan kesamaan nasib sebagai masyarakat terjajah. Musuh bersama kolonialisme telah membentuk Indonesia sebagai “subjek politis” tunggal.

Namun harus disadari bahwa *civic nation* adalah sebuah konsep yang abstrak dan karena itu sulit dijadikan sebagai perekat emosional sebuah bangsa. Kekosongan elemen emosional ini pada awal berdirinya republik ini diisi dengan narasi bersama “perang melawan kolonialisme”. Akan tetapi, ketika narasi bersama entah itu kolonialisme atau komunisme raib, maka bayangan sebagai satu bangsa pun menjadi samar samar. Ketika segelintir orang hidup di atas gelimang kemewahan dan mayoritas rakyat harus hidup miskin dan bantuan sosial untuk mereka masih dikorupsi lagi, maka tak mungkin untuk “membayangkan” Indonesia sebagai satu komunitas. Krisis solidaritas komunitas ini diperparah lagi oleh ekspansi tanpa kontrol publik dari birokrasi negara hukum dan pasar kapitalis ke wilayah-wilayah sosial-kultural. Kepentingan “kita” sebagai bangsa diganti dengan bahasa kepentingan diri.

### **3. Toleransi Otentik**

#### **Toleransi pasif**

Di Indonesia relasi antara kelompok mayoritas dan minoritas sering masih didominasi oleh pola relasi timpang. Hal ini paling banyak dialami oleh para penganut kepercayaan yang adalah kelompok minoritas. Konsep

---

<sup>2</sup> Bdk. F. Budi Hardiman, Bangsa sebagai Metafora Solidaritas (Ms), Jakarta 2011

toleransi seperti ini dikenal dengan nama toleransi pasif. Artinya, toleransi dipandang sebagai sikap terpaksa membiarkan yang lain hidup lantaran *factum* pluralitas. Toleransi belum tampil sebagai kebijakan politik demokrasi yang harus diperjuangkan..

Sementara itu, kualitas demokrasi di Indonesia yang plural sangat ditentukan oleh kualitas kebijakan toleransi yang berpijak pada prinsip hak, kebebasan dan kesetaraan. Karena itu sudah saatnya untuk beralih dari model toleransi belas kasihan menuju paradigma *hak*. Bangsa Indonesia harus meninggalkan konsep toleransi pasif yang berbasiskan tradisi semata menuju toleransi otentik dengan penekanan pada persamaan hak antara kelompok mayoritas dan minoritas.

Berbeda dari toleransi pasif, toleransi otentik bersifat afirmatif terhadap hak hidup, kebebasan dan kehendak yang lain sebagai yang lain untuk berkembang. Dalam bahasa Rosa Luxemburg, kebebasan selalu berarti kebebasan berpikir lain.

Toleransi otentik atau biasa juga disebut toleransi respek berkaitan dengan sikap seseorang terhadap yang lain dalam relasi sosial. Prinsip toleransi ini sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang plural dan rentan terhadap konflik lantaran perbedaan agama, suku dan pandangan hidup.

#### **4. Agama dan Post-Sekularisme**

Untuk kondisi masyarakat post-sekular di mana agama-agama secara empiris dan normatif berkiprah di ruang publik, *respek* merupakan sikap yang tepat dalam relasi antara agama, tapi juga dalam relasi antara agama dan akal budi.

Post-sekularisme memberi ruang agar terjadi proses saling belajar antara agama dan akal budi sekular. Itu berarti, demikian Jürgen Habermas, akal budi tidak boleh bertindak sebagai hakim sepihak atas kebenaran-kebenaran religius, tapi bersedia mendengarkan klaim-klaim religius di ruang publik.

Agar dapat didengar dan dipahami di ruang publik yang plural, agama-agama pun harus mampu menerjemahkan doktrin-doktrinnya ke dalam bahasa nalar publik. Di samping itu, agama dituntut untuk mengakui otoritas nalar dalam ilmu pengetahuan dan prinsip egalitarianisme universal dalam hukum dan moral.

Agar agama mampu menerjemahkan ajarannya ke dalam bahasa nalar publik, setiap komunitas agama membutuhkan pembaharuan struktural yang membuka ruang bagi proses pluralisasi pandangan agama secara internal. Agama-agama harus secara kritis merefleksikan kembali sejarah dan doktrinnya, dengan bantuan metode historis kritis, kritik semantik dan hermeneutik.

Dengan kualitas refleksi seperti ini, bahaya *intoleransi* dan *fundamentalisme* agama pun dapat dihindari. Untuk itu agama perlu merumuskan gagasannya dalam bahasa nalar publik yang melampaui identitas aslinya yang pra-politis dan primordial, dan akhirnya ikut memberikan kontribusi dalam pembentukan solidaritas politis dan pascatradisional yang kokoh dalam sebuah masyarakat yang plural.